



Al-Ahnaf: Journal of Islamic Education, Learning and Religious Studies

Vol. 1 No. 1 (2024)
DOI: <https://doi.org/10.61166/ahnaf.v1i1.5>

ISSN: 3063-3389
pp. 65-79

Research Article

Pendidikan Islam di Indonesia pada Masa Kemerdekaan

Roby Ariatman

UIN Mataram; robbyariatman@gmail.com

Copyright © 2024 by Authors, Published by Al-Ahnaf: Journal of Islamic Education, Learning and Religious Studies. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : April 11, 2024
Accepted : June 02, 2024

Revised : May 26, 2024
Available online : June 14, 2024

How to Cite: Roby Ariatman. (2024). A Pendidikan Islam di Indonesia pada Masa Kemerdekaan. *Al-Ahnaf: Journal of Islamic Education, Learning and Religious Studies*, 1(1), 65-79. <https://doi.org/10.61166/ahnaf.v1i1.5>

Islamic Education in Indonesia during the Independence Period

Abstract. This article discusses Islamic education in Indonesia during the independence period. This research uses the library research research method, where data collection is carried out by searching for information through books, scriptures, journals, articles and other literature. The research results are that Islamic Education Institutions have been formally integrated into school since 1946, since the start of religious instruction in public schools. Finally, it is stated in Constitution No. 20 of 2003 concerning the National Education System. With this law, the position of Islamic education as part of the national education system has become more effective and efficient, both in the scope of general education institutions and the religious sector. The government's attention to Islamic religious education is relevant because these institutions have been equated with public schools so that there are no longer any differences between one institution and another Islamic education institution. One proof that Islamic education has received the government's attention can be seen from the influence of the ideas of reform that have developed in the Islamic world and the awakening of the Indonesian nation, the process by which general lessons have been included in the Madrasah curriculum, the

development of increasingly extensive schools, Islamic boarding schools and universities, and Islamic education occupies an important position in the national education system in Indonesia.

Keywords: Islamic Education, Indonesia, Independence

Abstrak. Artikel ini membahas tentang pendidikan Islam di Indonesia pada masa kemerdekaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian library research, yang pengumpulan datanya dilakukan dengan mencari informasi melalui buku, kitab, jurnal, artikel, dan literatur lainnya. Hasil research adalah, Lembaga Pendidikan Islam secara formal telah diintegrasikan kepada sekolah sejak tahun 1946, sejak dimulainya pelajaran agama pada sekolah umum. Pada akhirnya tercantum dalam Undang-Undang Dasar No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan adanya undang-undang tersebut, posisi pendidikan Islam sebagai bagian sistem pendidikan nasional semakin efektif dan efisien, baik pada lingkup lembaga pendidikan umum maupun bidang keagamaan. Perhatian pemerintah terhadap pendidikan agama Islam sudah relevan pada lembaga tersebut telah disetarakan dengan sekolah umum sehingga tidak ada lagi terdapat perbedaan antara lembaga yang satu dengan lembaga pendidikan Islam lainnya. Salah satu bukti bahwa Pendidikan Islam sudah mendapat perhatian pemerintah, dapat dilihat dari pengaruh ide pembaharuan yang berkembang pada dunia Islam dan kebangkitan bangsa Indonesia, proses demi proses pelajaran umum masuk dalam kurikulum Madrasah, pengembangan pembangunan lembaga sekolah, pesantren, perguruan tinggi yang semakin luas, dan pendidikan Islam menempati posisi penting dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Indonesia, Kemerdekaan

PENDAHULUAN

Awal mula pendidikan Islam di Indonesia berkesinambungan erat dengan sejarah awal masuknya Islam di Nusantara. Pada catatan sejarah mengungkapkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dan sangat memiliki berperan dalam memajukan kebudayaan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam tersebut diartikan sebagai upaya mewujudkan pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat di Indonesia sejak awal mula Islam datang khususnya pada masa kerajaan. Sejarah pendidikan Islam pada hakikatnya sangat berkaitan dengan sejarah Islam. Oleh sebab itu, periodisasi sejarah pendidikan Islam yang berada dalam periode-periode nilai sejarah Islam itu sendiri. Sejarah panjang pendidikan Islam di Indonesia setelah kemerdekaan memiliki catatan tersendiri.

Pemerintahan pada saat itu pada sistem pendidikan yang dualistis. Pertama, sistem pendidikan Islam yang tumbuh kembang dari masyarakat Islam itu sendiri. Hal ini terbukti dari dua corak yang berbeda yaitu: Sintesis dengan berbagai pola pendidikan yang bervariasi dan menolak segala hal yang berkaitan dengan barat. Kedua, Sistem pendidikan yang diatur oleh pemerintahan Belanda sehingga tidak adanya pengajaran agama di sekolah umum yang sekuler. Pendidikan Islam pada era setelah kemerdekaan masih dianggap sering bertentangan dengan sistem pendidikan yang tumbuh dan berkembang secara terpisah satu sama lain. Sistem pendidikan yang pada mulanya dapat dijangkau oleh kalangan atas saja dan pertumbuhan pendidikan secara mandiri pada kalangan masyarakat pada umumnya. (Abuddin Nata 2001)

Catatan sejarah mengungkapkan bahwa pemerintah mengusahakan untuk menyelenggarakan sebuah sistem pendidikan nasional sesuai dengan perundang-undangan. Berbagai kebijakan dalam sistem pendidikan yang kemudian

dipublikasikan oleh pemerintah. Pemerintahan yang berbentuk peraturan pemerintah, undang-undang dan berbagai kebijakan dari menteri pendidikan nasional. Pendidikan sebagai pilar penting dalam berdirinya sebuah bangsa. Adanya kebijakan pemerintah yang dimulai dari pemerintahan kolonial, awal dan pasca kemerdekaan hingga masa Orde Baru terkesan tidak menghiraukan pendidikan Islam.

Hal demikian menyebabkan lembaga pendidikan Islam memiliki berbagai kelemahan yang harus segera disikapi. Kelemahan tersebut diantaranya rendahnya sumber daya manusia Dengan demikian umat Islam belum mampu mengupayakan secara optimal dalam mewujudkan Islam sebagai cita-cita yang dipandang belum mampu mewujudkan ajaran Islam secara transformatif dan lembaga pendidikan Islam masih kurang diminati oleh masyarakat. Kelemahan tersebut dapat diatasi atas perjuangan dan kesabaran masyarakat dan tokoh-tokoh Islam.(Abdul Mukti 2008)

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, pengumpulan data dilakukan dengan menggali informasi dari berbagai sumber referensi, seperti jurnal, buku, kitab, majalah, berita dan lain sebagainya, tanpa perlu melakukan riset lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Pendidikan Islam secara formal telah diintegrasikan kepada sekolah sejak tahun 1946, sejak dimulainya pelajaran agama pada sekolah umum. Pada akhirnya tercantum dalam Undang-Undang Dasar No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan adanya undang-undang tersebut, posisi pendidikan Islam sebagai bagian sistem pendidikan nasional semakin efektif dan efisien, baik pada lingkup lembaga pendidikan umum maupun bidang keagamaan. Ketika dilihat berdasarkan dari undang-undang tersebut bahwa perhatian pemerintah terhadap pendidikan agama Islam sudah relevan pada lembaga tersebut telah disetarakan dengan sekolah umum sehingga tidak ada lagi terdapat perbedaan antara lembaga yang satu dengan lembaga pendidikan Islam lainnya. Salah satu bukti bahwa Pendidikan Islam sudah mendapat perhatian pemerintah, dapat dilihat dari pengaruh ide pembaharuan yang berkembang pada dunia Islam dan kebangkitan bangsa Indonesia, proses demi proses pelajaran umum masuk dalam kurikulum Madrasah. Buku pelajaran di susun sesuai dengan tingkatan madrasah Selanjutnya ketika keadaan tersebut berbeda ketika dengan politik pendidikan Islam pada masa Orde Baru yang dimulai tahun 1966.(Radinal Tamrin 2022)

Secara kompherensif, perkembangan pendidikan islam era kemerdekaan Indonesia terbagi menjadi 3 fase, yakni fase Orde lama, orde baru dan era reformasi. Tentu pendidikan Islam semakin berkembang sejalan dengan perkembangan fase kemerdekaan Indonesia, jika di tinjau kembali ketika Indonesia belum merdeka yang

memiliki keadaan pendidikan Islam yang masih sangat memprihatinkan di bawah tekanan dan penjajah belanda serta jepang. Sebelum Indonesia merdeka, pendidikan Islam di Indonesia didominasi oleh pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang fokus pada pengajaran agama, bahasa Arab, dan ilmu-ilmu keislaman. Pendidikan formal pada masa itu masih terbatas, dan pesantren menjadi pusat pembelajaran utama bagi masyarakat Muslim, sistem pendidikan Islam di masa kolonial juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah Belanda.

Meskipun terdapat sekolah-sekolah Islam, namun umumnya terbatas dan mendapat sedikit dukungan. Pada awal abad ke-20, beberapa organisasi Islam mulai mendirikan sekolah modern untuk mengimbangi pendidikan Barat yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial. Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia (1942-1945), pendidikan Islam mengalami beberapa perubahan. Jepang mempromosikan pendidikan nasionalis yang mencakup unsur-unsur Jepang, namun juga memberikan ruang untuk pendidikan agama termasuk Islam. Meskipun demikian, kontrol Jepang tetap ada, dan kebijakan pendidikan lebih ditentukan oleh kepentingan militer dan politik Jepang. Pendidikan Islam di masa itu cenderung lebih terpusat di pesantren dan lembaga-lembaga tradisional, dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan formal modern. Hal ini berubah seiring dengan perkembangan gerakan nasionalis dan perjuangan menuju kemerdekaan, di mana pendidikan menjadi fokus penting dalam membangun identitas nasional Indonesia, dan Kemerdekaan Indonesia memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan pendidikan Islam.

Pendidikan Islam masa orde lama

Pendidikan Islam pada masa orde lama, Setelah Indonesia merdeka penyelenggaraan pendidikan agama Islam mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha untuk itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga tersebut sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) tanggal 27 desember 1945 yang menyebutkan bahwa: "Madrasah dan pesantren pada hakikatnya dalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah"(Timur Djaelani 1980). Mengingat kembali keadaan pendidikan islam masa kolonial yang di hadapkan oleh Sikap dan kebijaksanaan pemerintah colonial yang amat diskriminatif terhadap kaum muslimin. Itulah yang menyebabkan mengapa kaum muslimin Indonesia amat tercecce dalam segi intelektualitas ketimbang golongan lain. Akan tetapi keadaan berubah secara radikal setelah kemerdekaan Indonesia tercapai seakan-akan merupakan ganjaran untuk para pahlawan nasional sepanjang sejarah yang umumnya terdiri para ulama atau yang dijiwai oleh keislaman itu, kemerdekaan membuahkan

sesuatu yang luar biasa manfaatnya bagi kaum muslimin, terutama dibidang pendidikan modern.(Ridwan Saidi 1984)

Di tengah-tengah berkobarnya revolusi fisik, pemerintah RI tetap membina pendidikan agama. Pembinaan pendidikan agama tersebut secara formal institusional dipercayakan kepada departemen Agama dan departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu dikeluarkan aturan-aturan bersama antara kedua departemen tersebut untuk mengelola pendidikan agama di sekolah-sekolah umum baik negeri maupun swasta. Khusus untuk mengelola pendidikan agama yang diberikan di sekolah-sekolah umum tersebut maka pada bulan desember 1946 dikeluarkan surat keputusan bersama (SKB) antara menteri pendidikan dan menteri agama yang mengatur pelaksanaan pendidikan agama pada sekolah-sekolah umum (negeri dan swasta) yang berada dibawah kementerian pendidikan. Maka sejak itulah terjadi semacam dualisme pendidikan di Indonesia yaitu pendidikan agama dan pendidikan umum.

Disatu pihak kementerian agama mengelola semua jenis pendidikan agama baik di sekolah-sekolah agama maupun di sekolah-sekolah umum. Dan dilain pihak departemen pendidikan pengajaran dan kebudayaan mengelola pendidikan pada umumnya dan mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan system pendidikan nasional. Keadaan ini sempat dipertanyakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak senang dengan adanya pendidikan agama terutama golongan komunis, sehingga ada kesan seakan-seakan pendidikan agama khususnya Islam terpisah dari pendidikan. Selanjutnya pendidikan agama ini diatur secara khusus di dalam undang-undang nomor 4 tahun 1950 pada bab XII pasal 20 yaitu:

1. Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya mengikuti pelajaran tersebut.
2. Cara penyelenggaraan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh menteri pendidikan pengajaran dan kebudayaan bersama-sama dengan menteri agama.(Aidil Sudarmono 2020)

Sementara itu peraturan bersama menteri pendidikan dan menteri agama nomor 1432 tanggal 20 januari 1951 diatur tentang peraturan pendidikan agama di sekolah-sekolah yaitu:

1. Pasal 1. Tiap-tiap sekolah rendah dan sekolah lanjutan diberi pendidikan agama.
2. Pasal 2. Point A: di sekolah-sekolah rendah pendidikan agama dimulai pada kelas 4 banyaknya 2 jam 1 minggu. Point B: di lingkungan yang istimewa, pendidikan agama dapat dimulai pada kelas 1 dan jamnya dapat ditambah menurut kebutuhan. Tetapi tidak melebihi 4 jam seminggu, dengan ketentuan bahwa mutu pengetahuan umum bagi sekolah-sekolah rendah itu tidak boleh dikurangi dibandingkan dengan sekolah-sekolah rendah dilain-lain lingkungan.

3. Pasal 3. Di sekolah-sekolah lanjutan tingkatan pertama dan tingkatan atas baik sekolah-sekolah umum maupun sekolah-sekolah kejuruan diberikan pendidikan agama 2 jam dalam tiap-tiap minggu.
4. Pasal 4. Point A: Pendidikan agama diberikan menurut agama masing-masing. Point B: Pendidikan agama baru diberikan pada sesuatu kelas yang mempunyai murid sekurang-kurangnya 10 orang yang menganut suatu macam agama. Point C: Murid dalam suatu kelas yang memeluk agama lain daripada agama yang sedang diajarkan pada suatu waktu, boleh meninggalkan kelasnya selama pelajaran itu. (Timur Djaelani 1980)

Di bidang kurikulum pendidikan agama diusahakan penyempurnaan penyempurnaan dalam hal ini dibentuk suatu kepanitiaan yang dipimpin oleh K.H Imam Zarkasyi dari pondok pesantren Ponorogo. Kurikulum tersebut disahkan oleh menteri Agama pada tahun 1952. Pada ketatanegaraan Republik Indonesia dinyatakan bahwa negara berdasarkan UUD 1945. Kedaulatan ditangan rakyat yaitu ditangan MPR. Sebelum dibentuknya MPR menurut UUD 1945 di Indonesia pernah dibentuk MPRS pada tahun 1959. Selanjutnya, Pada bulan desember 1960 saat sidang pleno MPRS diputuskan sebagai berikut: Melaksanakan kegiatan dibidang mental/agama/kebudayaan dengan syarat spiritual dan material agar setiap warga negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebangsaan Indonesia serta menolak pengaruh-pengaruh buruk budaya asing (Bab II Pasal 2 ayat 1). Dalam ayat 3 dari pasal tersebut dinyatakan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah umum mulai sekolah rendah (dasar) sampai universitas dengan perhatian bahwa murid berhak tidak ikut serta dalam pendidikan agama jika murid menyatakan keberatannya. Pada akhir orde lama pada tahun 1965 lahir semacam kesadaran baru bagi umat Islam dimana timbulnya minat yang mendalam terhadap masalah-masalah pendidikan yang dimaksudkan untuk memperkuat Islam, sehingga sejumlah organisasi Islam dapat dimantapkan.

Dalam hubungan ini kementerian agama telah mencanangkan rencana-rencana program pendidikan yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan jenis-jenis pendidikan serta pengajaran Islam sebagai berikut:(Aidil Sudarmono 2020)

1. Pesantren Indonesia Klasik, semacam sekolah swasta keagamaan yang menyediakan asrama yang sejauh mungkin memberikan pendidikan yang bersifat pribadi, sebelumnya terbatas pada pengajaran keagamaan serta pelaksanaan ibadah. Baik guru maupun para muridnya merupakan suatu masyarakat yang hidup serta bekerjasama mengerjakan tanah milik pesantren agar dapat memenuhi kebutuhan sendiri.
2. Madrasah Diniyah, yaitu sekolah-sekolah yang memberikan pengajaran tambahan bagi murid-murid negeri yang berusia 7 samapi 20 tahun. Pelajaran berlangsung di dalam kelas kira-kira 10 jam seminggu diwaktu sore, pada sekolah dasar dan sekolah menengah 4 tahun pada sekolah dasar dan 3 tahun sampai 6 tahun pada sekolah menengah). Setelah menyelesaikan pendidikan

- menengah negeri murid-murid ini dapat diterima pada pendidikan agama tingkat akademi.
3. Madrasah-madrasah swasta, yaitu pesantren yang dikelola secara modern yang bersamaan dengan pengajaran agama juga diberikan pelajaran umum. Biasanya tujuannya adalah menyediakan 60%-65% dari jadwal waktu untuk mata pelajaran umum, dan 35%-40% untuk mata pelajaran agama.
 4. Madrasah ibtidaiyah negeri (MIN), yaitu sekolah dasar negeri 6 tahun dimana perbandingan umum kira-kira 1:2. Pendidikan selanjutnya dapat diikuti pada MTSN atau sekolah tambahan tahun ketujuh murid-murid dapat mengikuti pendidikan keterampilan misalnya pendidikan guru agama untuk sekolah dasar negeri setelahnya dapat diikuti latihan lanjutan 2 tahun untuk menyelesaikan kursus guru agama untuk sekolah menengah.
 5. Suatu percobaan baru telah ditambahkan pada madrasah ibtidaiyah negeri (MIN) 6 tahun, dengan menambahkan kursus selama 2 tahun yang memberikan latihan keterampilan sederhana. MIN 8 tahun ini merupakan pendidikan lengkap bagi para murid yang biasanya akan kembali ke kampungnya masing-masing.
 6. Pendidikan teologi tertinggi, pada tingkat universitas diberikan sejak tahun 1960 pada IAIN. IAIN ini dimulai pada dua bagian atau dua fakultas di Yogyakarta dan dua fakultas di Jakarta. (Aidil Sudarmono 2020)

Pendidikan Pada masa orde baru

Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan pembinaan terhadap pesantren melalui Proyek Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Dana pembinaan pesantren diperoleh dari pemerintahan terkait, dari pemerintahan pusat hingga daerah. Tahun 1975, muncul gagasan untuk mengembangkan pondok pesantren dengan model baru. Lahirlah Pondok Karya Pembangunan, Pondok Modern, Islamic Centre, dan Pondok Pesantren Pembangunan. Kemudian banyak pesantren yang mendirikan sekolah umum dengan kurikulum sekolah umum yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri No. 03 Tahun 1975 (SKB 3 Menteri), menetapkan mata pelajaran umum sekurang-kurangnya sebanyak 70% dari seluruh kurikulum madrasah. Banyak juga madrasah yang mendirikan perguruan tinggi seperti Pesantren Al-Syafi'iyah dan Pesantren Al-Tahiriyah. (Yuningsih 2015)

SKB ini merupakan model solusi yang memberikan pengakuan kepada eksistensi madrasah dan sebagai usaha yang mengarah pada pembentukan Sistem Pendidikan Nasional yang integratif. Dalam SKB tersebut diakui ada tiga tingkatan madrasah yaitu, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah yang ijazahnya diakui sama dan setingkat dengan SD, SMP, SMA. Kemudian lulusannya dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih tinggi, serta siswanya dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat. (Ramayulis 2011). Menurut Anzar Abdullah, kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai pendidikan Islam dalam konteks madrasah di Indonesia bersifat

positif dan konstruktif, khususnya dalam dua dekade terakhir tahun 1980an sampai dengan 1990-an. Pada masa pemerintah Orde Baru, lembaga pendidikan madrasah dikembangkan dalam rangka pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan. Setelah SKB (Surat Keputusan Bersama) Tiga menteri, selanjutnya diperkuat lagi dengan dikeluarkannya SKB Menteri P&K No.299/U/1984 Dikbud); No 45 Tahun 1984 (Agama) tentang Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Sekolah Madrasah yang isinya antara lain mengizinkan kepada lulusan madrasah untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah umum yang lebih tinggi. (Steenbrink 1994)

Pendidikan SKB 2 Menteri dalam rangka penyesuaian sistem pendidikan sejalan dengan adanya kebutuhan pembangunan di segala bidang, antara lain dilakukan melalui perbaikan kurikulum sebagai salah satu upaya perbaikan penyelenggaraan pendidikan di madrasah maupun sekolah umum. Upaya dalam pengaturan dan pembaruan kurikulum madrasah dikembangkan dengan menyusun kurikulum sesuai dengan yang ditetapkan. Khusus untuk MA, waktu untuk setiap mata pelajaran berlangsung selama 45 menit dan memakai semester. Sementara itu, jenis program pendidikan dalam kurikulum madrasah terdiri dari program inti dan program pilihan. Pengembangan kedua program kurikulum ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu: pendidikan agama terdiri atas: al-Qur'an, Hadis, Aqidah Akhlak, Fiqih, SKI, dan Bahasa Arab. Pendidikan umum antara lain: PMP, PSPB, Bahasa dan Sastra Indonesia, Pengetahuan Sains, Olahraga dan Kesehatan, Matematika, Pendidikan Seni, Pendidikan Keterampilan, Bahasa Inggris (MTS dan MA), Geografi (MA), Biologi (MA), Fisika (MA) dan Kimia (MA). (Yuningsih 2015). Substansi dari pembakuan kurikulum di sekolah umum dan madrasah ini memuat antara lain:

1. Kurikulum sekolah umum dan madrasah terdiri dari program inti dan program khusus.
2. Program inti untuk memenuhi tujuan pendidikan pada sekolah umum dan madrasah secara kualitatif sama.
3. Program khusus (pilihan) diadakan untuk memberikan bekal kemampuan siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi bagi sekolah dan madrasah tingkat menengah atas.
4. Pengaturan pelaksanaan kurikulum sekolah dan madrasah mengenai sistem kredit, bimbingan karir, ketuntasan belajar dan sistem penilaian adalah sama.
5. Hal-hal yang berhubungan dengan tenaga guru dan sarana pendidikan dalam rangka keberhasilan Pelaksanaan kurikulum akan diatur bersama oleh kedua departemen yang bersangkutan. (Ramayulis n.d.)

Secara formal, madrasah sudah menjadi sekolah umum yang menjadikan agama sebagai ciri khas kelembagannya. Sebenarnya, materi pengetahuan umum bagi madrasah secara kuantitas dan kualitas mengalami peningkatan, tetapi di sisi lain penguasaan murid terhadap pengetahuan agama menjadi serba tanggung. Menyadari kondisi tersebut, muncul keinginan pemerintah dalam hal ini menteri

Agama Munawir Sadzali untuk mendirikan Madrasah Aliyah yang bersifat khusus, yang kemudian dikenal dengan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK). Dalam MAPK ini terlihat pendidikan agama memperoleh porsi persentase yang lebih tinggi seperti tertuang dalam kurikulum MAPK tahun 1993 (70 % agama – 30 % umum). Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan program pembibitan calon-calon ulama melalui sistem asrama (program tutorial) dan mengembangkan kemahiran berbahasa arab dan Inggris. (Depag RI 1994)

Pemerintah memberlakukan pendidikan agama dari tingkat SD hingga universitas (TAP MPRS No. XXVII /MPRS/1966).

1. Madrasah mendapat perlakuan dan status yang sejajar dengan sekolah umum.
2. Pesantren mendapat perhatian melalui subsidi dan pembinaan.
3. Berdirinya MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada tahun 1975.
4. Pelarangan SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah) mulai tahun 1993 setelah berjalan sejak awal tahun 1980- an.
5. Pemerintah memberi ijin pada pelajar muslimah untuk memakai rok panjang dan busana jilbab di sekolah-sekolah negeri sebagai ganti seragam sekolah yang biasanya rok pendek dan kepala terbuka.
6. Terbentuknya UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
7. Terbentuknya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
8. Adanya Kompilasi Hukum Islam.
9. Dukungan pemerintah terhadap pendirian Bank Islam, Bank Muamalat Islam.
10. Pendirian BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Sadaqah).
11. Pemberian label halal dan haram oleh MUI bagi kemasan produk makanan dan minuman, terutama bagi jenis olahan.
12. Pemerintah memfasilitasi penyebaran da'i ke daerah terpencil dan lahan transmigrasi.
13. Mengadakan MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur'an).
14. Mengadakan peringatan hari besar Islam di Mesjid Istiqlal.
15. Mencetak dan mengedarkan mushab al-Qur'an dan buku-buku agama Islam yang kemudian disalurkan ke masjid dan perpustakaan Islam.
16. Terpusatnya jama'ah haji di asrama haji.
17. Penayangan pelajaran bahasa Arab di TVRI.
18. Berdirinya MAN PK (Program Khusus).
19. Mengadakan pendidikan Pascasarjana untuk dosen IAIN, baik ke dalam maupun ke luar negeri. Khusus mengenai kebijakan ini, Departemen Agama telah membuka program Pascasarjana IAIN sejak 1983 dan join cooperation dengan negara-negara Barat untuk studi lanjut jenjang Magister maupun Doktor.

Pendidikan Islam masa Reformasi

Reformasi dimulai sejak berakhirnya masa orde baru yang dipimpin oleh Soeharto. Lengsernya kekuasaan Soeharto pada tahun 1998 menjadi tanda adanya reformasi. Makna reformasi adalah perubahan secara drastis. Reformasi juga dapat disebut sebagai upaya pembaharuan (modernisasi) yang dilakukan secara

menyeluruh pada seluruh sistem kehidupan sosial, politik, ekonomi, bahkan pendidikan. (Jannah, M 2019) Reformasi terjadi karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Rakyat menganggap pemerintah tidak memihak terhadap rakyat. Karena pemerintahan dikuasai oleh tentara sehingga rakyat merasa tidak ada sistem demokrasi yang dijalankan. Selain masalah dari aspek politik juga terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan inflasi dan harga barang pokok semakin melambung tinggi. Reformasi ini dilakukan agar dapat memperbaiki sistem dari berbagai bidang termasuk dalam bidang pendidikan. Reformasi pada bidang pendidikan dilakukan karena faktor sebagai berikut :

1. Biaya sekolah yang mahal. Karena terjadi inflasi mata rupiah mengakibatkan biaya yang harus dikeluarkan untuk sekolah pun menjadi sangat mahal. Sehingga para orang tua meminta terhadap pemerintah untuk dapat menurunkan biaya sekolah anaknya.
2. Ketidakmerataan pendidikan di daerah-daerah pelosok. Pendidikan pada masa orde baru masih belum merata. Sehingga diharapkan dengan adanya reformasi pendidikan dapat dirasakan oleh penduduk terutama penduduk yang hidup diperbatasan Negara Indonesia.
3. Infrastruktur sekolah yang masih harus dibenahi. Dengan dilakukan reformasi rakyat berharap sarana dan prasarana disekolah diperbaiki seperti sumbangan buku dan dana BOS yang dapat menunjang kompetensi siswa.

Reformasi Pendidikan Islam artinya pembaharuan Pendidikan Islam agar menjadi lebih baik. Sebutan “ Pendidikan Islam ” pada umumnya dipahami sebagai suatu ciri khas, yaitu jenis pendidikan yang berlatar belakang keagamaan. Dapat juga digambarkan bahwa pendidikan yang mampu membentuk “ manusia yang unggul secara intelektual, kaya dalam amal, dan anggun dalam moral ” (Rijal 2014) Pada masa orde baru Pendidikan Islam dilarang berkembang dalam masyarakat karena dengan adanya pesantren, majelis taklim, madrasah dianggap akan memunculkan kelompok-kelompok yang mampu meruntuhkan kekuasaan pemerintah. Pada masa orde baru pendidikan Islam eksistensinya sempat turun karena banyak argumen masyarakat yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia bukan negara Islam. Adanya permasalahan tersebutlah yang membangkitkan semangat para tokoh agama. Pada masa reformasi pembaharuan Pendidikan Islam dirintis oleh tokoh seperti Syekh Abdullah Ahmad, Zainudin-Labai Yunus, dan tokoh-tokoh yang lain. Selain itu juga dibentuk organisasi – organisasi Islam seperti Jamiat Khair, Al-Irsyad, Persyarikatan Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam dan Nahdatul Ulama. Pada masa reformasi Pendidikan Islam lebih diperhatikan dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah untuk mengatur berbagai pendidikan. Selain itu Pendidikan Islam juga memiliki kedudukan yang sama dengan pendidikan umum. Hal ini tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Tidak hanya itu pada masa reformasi Pendidikan

Agama Islam pun menjadi mata pelajaran di sekolah umum. Hal ini membuktikan bahwa perkembangan Pendidikan Islam pada era reformasi mengalami kemajuan.

Pesantren dan madrasah pun mulai berkembang di berbagai daerah dan kedudukannya setara dengan sekolahsekolah umum. Pada era reformasi kuantitas dan kualitas guru lebih meningkat daripada masa orde baru dan orde lama. Sehingga dengan adanya para guru yang memadai maka pelajar dengan mudah mendapat ilmu yang telah diajarkan. Selain pemerintahan pusat melakukan pemerataan jumlah guru dan mengadakan perubahan kurikulum yaitu program pendidikan. Pemerintah juga meningkatkan anggaran Pendidikan 20% dari APBN(Rohayah 2017). Dengan adanya kerja sama antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat mampu menciptakan perubahan yang lebih baik terutama dalam bidang Pendidikan Islam. Dengan adanya Pendidikan Agama Islam diharapkan pelajar mampu mendapatkan ilmu pengetahuan secara umum dan pengetahuan tentang syariat Islam. Sehingga pelajar tidak hanya fokus terhadap pendidikan umum saja tetapi juga memahami tentang pendidikan moral yang baik yang sesuai dengan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam pada masa reformasi sudah mengalami perkembangan dari masa sebelumnya. Diharapkan perkembangan ini terus berlanjut agar para generasi bangsa tidak hanya pandai dalam ilmu umum saja tetapi juga pandai dalam ilmu agama. Karena dalam ilmu agama Islam telah diajarkan untuk berperilaku baik dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Bukan hanya pendidikan Agama Islam saja yang berkembang pada era reformasi tetapi pendidikan secara menyeluruh, pendidikan agama lain pun juga mengalami perkembangan.

Adapun kurikulum Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi Saat negara mengalami perubahan politik pemerintahan, pasti berpengaruh juga terhadap bidang pendidikan. Dan mengakibatkan pergantian kurikulum yang berlaku. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan lembaga pendidikan kepada peserta didik (pelajar). Pemerintah mengeluarkan peraturan No. 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan. Kurikulum yang berlaku disekolah harus sesuai dengan kurikulum standar Nasional. Sehingga Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia mengeluarkan peraturan pendidikan no 20 tahun 2006 tentang struktur kurikulum, beban pelajar, standar kompetensi. Untuk sekolah dibawah naungan Departemen Agama juga turut mengeluarkan Peraturan Pendidikan No. 2 Tahun 2008 oleh menteri agama tentang standar kompetensi kelulusan dan standar isi pendidikan Agama Islam dan bahasa Arab di Madrasah (Rohayah 2017 : 5-6). Penyusunan kurikulum menurut.(Rohayah 2017) yang disebutkan dalam pasal 36 ayat 3 harus memperhatikan:

1. Peningkatan Iman dan Takwa
2. Peningkatan Akhlak Mulia
3. Peningkatan Potensi, Kecerdasan, dan Minat Peserta Didik

4. Keragaman Potensi Daerah dan Lingkungan
5. Tuntutan Pembangunan Daerah dan Nasional
6. Tuntutan Dunia Kerja
7. Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Seni
8. Agama
9. Dinamika Perkembangan Global
10. Persatuan Nasional dan Nilai-nilai Kebangsaan.

Pada masa reformasi telah berkembang kurikulum yaitu kurikulum KBK pada tahun 2004 dan kurikulum KTSP pada tahun 2006 dan kurikulum 13. Kurikulum KBK (kurikulum berbasis kompetensi) guru hanya sebagai fasilitator dan siswa aktif dalam mengembangkan keterampilan. Pada kurikulum ini juga diwajibkan adanya ekstrakurikuler Pramuka untuk membentuk karakter siswa. Kurikulum KTSP (kurikulum tingkat satuan pendidikan) kurikulum ini sebagai perbaikan dari kurikulum kbk. Kurikulum KTSP ini disusun untuk mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan (SKL). K13 (kurikulum 2013) karena kurikulum KTSP sulit mendapat mencapai pendidikan nasional maka diganti dengan kurikulum 13 yang memiliki 3 aspek yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan dan aspek sikap dan perilaku. (Al-Afasy 2016) Pada kurikulum KBK 2004 untuk pelajaran pendidikan agama Islam standar kompetensinya yang disajikan sangat sederhana namun dapat mencakup standar kompetensi pendidikan agama Islam secara menyeluruh contohnya sebagai berikut:

1. Mengamalkan ajaran Al-Qur'an dan hadist dalam kehidupan sehari-hari
2. Menerapkan aqidah Islam dalam kehidupan sehari-hari
3. Mengambil manfaat dari sejarah perkembangan Islam dalam kehidupan sehari-hari

Diharapkan siswa mampu mempelajari dan juga dapat mengamalkan pendidikan agama Islam di kehidupan sehari-hari. Kurikulum dibuat untuk dapat menjadi pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam Pada Era Reformasi. Pada masa reformasi pendidikan Islam lebih diperhatikan oleh pemerintah. Dengan dikeluarkannya UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas. Menyatakan bahwa pendidikan Islam memiliki kedudukan yang sama dengan pendidikan umum. Menurut Muhaimin (Muhaimin 2013) adapun kebijakan pemerintah dalam menyempurnakan pendidikan Islam:

1. Pemerintah mendirikan sekolah-sekolah Islam dari sekolah dasar hingga tingkat perguruan tinggi seperti MI, MTS, MA, PTAIN, PTAIS. Dengan adanya kebijakan ini maka sekolah Islam berkembang seperti contohnya di Malang saja banyak universitas Islam seperti UIN, UMM, UNISMA universitas ini pun eksistensinya tidak kalah dengan universitas umum.

2. Pemerintah juga membantu meningkatkan pendidikan di pondok pesantren dengan memberikan bimbingan atau kurikulum, memberikan saran pendidikan, meningkatkan subsidi terhadap guru, memberikan teknologi seperti komputer untuk dapat digunakan dalam meningkatkan iptek. Adanya dukungan dari pemerintah ini dapat memudahkan santri untuk belajar dan mendapatkan ilmu.
3. Pemeliharaan sekolah dasar sampai perguruan tinggi Islam dengan memberikan bantuan untuk dapat memperbaiki sarana dan prasarana di sekolah Islam.
4. Memberikan pendidikan agama di sekolah umum terutama pendidikan Islam. Dari sekolah dasar hingga tingkat perguruan tinggi akan mendapat mata pelajaran Agama Islam. Tidak hanya agama Islam saja tetapi juga agama yang lain. Tujuannya agar siswa mampu belajar untuk menata sikap dan perilaku. Karena dalam pendidikan agama Islam telah diajarkan hal-hal yang baik dan buruk. Yang wajib dikerjakan dan meninggalkan yang dilarang. Siswa tidak hanya cerdas intelektual tetapi juga cerdas dalam spiritual.
5. Pembinaan pendidikan agama pada perguruan tinggi negeri dan swasta. Tidak hanya siswa tetapi mahasiswa pun masih tetap wajib mendapat mata kuliah agama.
6. Merancang kurikulum yang sesuai dengan sistem pendidikan Islam.

Menteri agama pun telah mengeluarkan peraturan pendidikan Islam. Sehingga akan menjadi pedoman standar kompetensi yang dicapai oleh para pelajar. Perkembangan pendidikan Islam era reformasi semakin meningkat dan tersistematis.

SIMPULAN

Pendidikan Islam pada masa orde lama Pendidikan Islam di masa itu cenderung lebih terpusat di pesantren dan lembaga-lembaga tradisional, dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan formal modern. Hal ini berubah seiring dengan perkembangan gerakan nasionalis dan perjuangan menuju kemerdekaan, di mana pendidikan menjadi fokus penting dalam membangun identitas nasional Indonesia, dan Kemerdekaan Indonesia memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan pendidikan Islam. penyempurnaan kurikulum yang dipimpin oleh K.H Imam Zarkasyi dari pondok pesantren Ponorogo. Kurikulum tersebut disahkan oleh menteri Agama pada tahun 1952 jenis pendidikan islam pada masa itu, berupa Pesantren Indonesia Klasik, Madrasah Diniyah, Madrasah-madrasah swasta, Madrasah ibtidaiyah negeri, Pendidikan teologi tertinggi, Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan pembinaan terhadap pesantren melalui Proyek Pembangunan Lima Tahun (Pelita) dan pendidikan islam semakin berkembang

berupa pendidikan islam terlaksana semakin luas seperti adanya Kemudian banyak pesantren yang mendirikan sekolah umum dengan kurikulum sekolah umum yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri No. 03 Tahun 1975 (SKB 3 Menteri), menetapkan mata pelajaran umum sekurang-kurangnya sebanyak 70% dari seluruh kurikulum madrasah. Banyak juga madrasah yang mendirikan perguruan tinggi seperti Pesantren Al-Syafi'iyah dan Pesantren Al-Tahiriyah. Pada masa reformasi pembaharuan Pendidikan Islam dirintis oleh tokoh seperti Syekh Abdullah Ahmad, Zainudin-Labai Yunus, dan tokoh-tokoh yang lain. Selain itu juga dibentuk organisasi –organisasi Islam seperti Jamiat Khair, Al-Irsyad, Persyarikatan Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam dan Nahdatul Ulama. Pada masa reformasi Pendidikan Islam lebih diperhatikan dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah untuk mengatur berbagai pendidikan. Selain itu Pendidikan islam juga memiliki kedudukan yang sama dengan pendidikan umum. Hal ini tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas tujuan Pendidikan nasional dan Menyatakan bahwa pendidikan Islam memiliki kedudukan yang sama dengan pendidikan umum Pendidikan Agama Islam pun menjadi mata pelajaran di sekolah umum. Pesantren dan madrasah pun mulai berkembang di berbagai daerah dan kedudukannya setara dengan sekolahsekolah umum. Pada era reformasi kuantitas dan kualitas guru lebih meningkat daripada masa orde baru dan orde lama, Pemerintah juga meningkatkan anggaran Pendidikan 20% dari APBN. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat mampu menciptakan perubahan yang lebih baik terutama dalam bidang Pendidikan Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mukti. 2008. *Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media.
- Abuddin Nata. 2001. *Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Aidil Sudarmono. 2020. "Tinjauan Sejarah Pendidikan Islam Masa Orde Lama." *Jurnal Studi Pemikiran Pendidikan Agama Islam* 18: 1.
- Al-Afasy. 2016. "Sejarah Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi Hingga Kekinian." (<http://artikelindokita.blogspot.com/2016/06/sejarahpendidikan-islam-pada-masa.html>).
- Depag RI. 1994. *Panduan Kurikulum Madrasah Aliyah 1994*. Depag RI.
- Jannah,M, dkk. 2019. "Sejarah Reformasi Pendidikan Islam Di Indonesia."
- Muhaimin. 2013. *Rekonruksi Pendidikan Islam*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Radinal Tamrin. 2022. "Konsep Perkembangan Pendidikan Islam Pasca Proklamasi

- Indonesia.” *Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 8: 1.
- Ramayulis. 2011. *Sejarah Pendidikan Islam: “Perubahan Konsep, Filsafat Dan Metodologi Dari Era Nabi SAW Sampai Ulama Nusantara.”* Jakarta: Kalam Mulia.
- Ridwan Saidi. 1984. *Pemuda Islam Dalam Dinamika Politik Bangsa 1925-1984.* Jakarta: CV Rajawali.
- Rijal, S. 2014. “Reformasi Pendidikan Islam.” (<http://ejournal.staima.alhikam.ac.id/index.php/talimuna/article>).
- Rohayah. 2017. “Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi.” [https://www.academia.edu/35996335 Makalah_Pendidikan_Islam_pada_Masa_Reformasi.docx](https://www.academia.edu/35996335/Makalah_Pendidikan_Islam_pada_Masa_Reformasi.docx).
- Steenbrink, Karel A. 1994. *Pesantren Madrasah Sekolah Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern.* Jakarta.
- Timur Djaelani. 1980. *Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Bangunan Perguruan Agama.* Jakarta: Dermaga.
- Yuningsih, Heni. 2015. “Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru.” *JURNAL TARBIYA* 1: 175.